



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Disusun secara objektif, LKj ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) dan Logical Framework sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 mencakup lima bidang utama:

Pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan;

1. Operasi kapal pengawas dan pesawat patroli;
2. Penyiapan logistik armada pengawasan;
3. Pengawakan armada pengawasan;
4. Pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan;

Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I (Ditjen PSDKP), serta prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran Direktorat POA. Kami menyadari tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini menjadi dasar dan refleksi serta rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA. Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, 21 Januari 2026
Direktur Pengendalian Operasi
Armada

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Saiful Umum, S.St.Pi, MM



LAPORAN KINERJA

—Tahun 2025

Tim Penyusun

Penanggungjawab
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

Bayu Khrisna Adrianto, S.St.Pi
Ikrom Bungsu, S.Pi
Vandra Anggriawan, SH
Atika Fauziah A.Md

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

Davianda Bagus Hendaru, ST
Retno Wijayanti, S.Kom
Noval Reza Jaya, A.Md
Wiwin Herwina, A.Md
Rachmat Sofyan, S.St.Pi

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Tim Penyusun	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
Ringkasan Eksekutif	9

BAB I **12**

Pendahuluan	12
Latar Belakang	13
Maksud dan Tujuan	14
Tugas dan Fungsi Direktorat POA	15
Sistematika Penyajian	16

BAB II **17**

Perencanaan Kinerja	17
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	18
Perjanjian Kinerja Dit. POA	20
ALOKASI ANGGARAN	24

BAB III **25**

Akuntabilitas Kinerja	25
Pengukuran Capaian Kinerja	26
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	27
Realisasi Anggaran	57

BAB IV **59**

Penutup	59
Lampiran	61



Daftar Tabel



Tabel 1 Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW IV Tahun 2025	10
Tabel 2. Alokasi Anggaran. Direktorat POA 2025	26
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-1 TW IV Tahun 2025	29
Tabel 4 Cakupan WPPNRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) TRIWULAN IV 2025	31
Tabel 5 Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Automatic Identification System (AIS) TRIWULAN IV 2025	32
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 2 Periode TW IV Tahun 2025	33
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU-3 Triwulan IV Tahun 2025	34
Tabel 8. Komponen Perhitungan IKU 3	34
Tabel 9. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Desember 2025	35
Tabel 10 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Oktober 2025	35
Tabel 11 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan November 2025	35
Tabel 12 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Desember 2025	35
Tabel 13 Jumlah Pemantauan Kapal Pengangkut Ikan Hidup s.d bulan September 2025	36
Tabel 14 Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi s.d bulan Desember 2025	36
Tabel 15. Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA TW IV Tahun 2025	37
Tabel 16. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW IV Tahun 2025	38
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW IV Tahun 2025	39
Tabel 18. Capaian Wilayah dan Hari Operasi s.d. Triwulan IV 2025	40
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 6 Periode TW IV Tahun 2025	42
Tabel 20. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Per Unsur Produk Layanan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	43
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2025	45
Tabel 22. Target dan realisasi IKU 8 pada periode TW IV tahun 2025	46
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 9 pada periode TW IV tahun 2025	47
Tabel 24. Metode Penilaian dengan Condition Assesment Programme	47
Tabel 25. Daftar Pelaksanaan Survei Kondisi Teknis Kapal Pengawas Tahun 2025	47
Tabel 26. Daftar Laporan Kondisi Teknis KP	47
Tabel 27. Lapkonis KP Kelas II dan III (UPT)	50
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 10 pada periode TW IV tahun 2025	50
Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW IV Tahun 2025	51
Tabel 30. Target dan Realisasi IKU-12 Periode TW IV Tahun 2025	53
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 13 periode TW IV Tahun 2025	54
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU 14 Periode TW IV Tahun 2025	55
Tabel 33 Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko	55
Tabel 34. Target dan realisasi IKU 15 periode TW IV Tahun 2025	56
Tabel 35. Target dan realisasi IKU 16 periode TW IV Tahun 2025	57
Tabel 36. Target dan realisasi IKU 17 periode TW	58
Tabel 37. Target dan realisasi IKU 18 periode TW IV Tahun 2025	59
Tabel 38. Rincian target dan realisasi IKU 19 periode TW IV Tahun 2025	60
Tabel 39. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW IV Tahun 2025	61

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	15
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025	28
Gambar 4 Ilustrasi Pemantauan menggunakan SPKP periode Triwulan IV 2025	30
Gambar 5 Ilustrasi Pemantauan menggunakan AIS periode Triwulan IV 2025	30
Gambar 6 Kawasan Konservasi yang dipantau periode Oktober - Desember 2025	31
Gambar 7 Tangkapan Layar Aplikasi SUSAN KKP	33
Gambar 8. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (Henrikhan) Kapal Ikan Asing oleh Kapal Pengawas	38
Gambar 9. Dokumentasi Kapal Perikanan dan Objek SDK yang Dipantau Oleh Operasi Pesawat Patroli	40
Gambar 10. Peningkatan Kompetensi Keterampilan SSO dan SDSD	45
Gambar 11. MCU AKP	45
Gambar 12. Psikotest Pemegang Senjata bagi AKP	45
Gambar 13. Penyegaran kemampuan teknis menembak bagi AKP tahun 2025	45
Gambar 14. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca 01	48
Gambar 15. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca 02	48
Gambar 16. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca03	48
Gambar 17 Pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSD-KP tentang Manajemen Mutu	51
Gambar 18 Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	52
Gambar 19. Piagam Penghargaan Predikat Zona Integritas Menuju WBK Direktorat POA	57



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli
Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas



Ringkasan Eksekutif



Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini merefleksikan komitmen Direktorat POA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Peta Strategis Direktorat POA Tahun 2025, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja (IK) sebagai tolok ukur pelaksanaan program. Pada Triwulan IV Tahun 2025, capaian kinerja Direktorat POA mencapai 106,42%.

Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah merealisasikan 19 Rincian Output (RO) sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025. Adapun pagu anggaran Direktorat POA ditetapkan sebesar Rp 245.879.080.000 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW IV Tahun 2025 sebesar Rp. 240,259,903,800 (dua ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 96,46% dari Pagu anggaran.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip budget follow program secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW IV Tahun 2025, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:



Tabel 1 Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW IV Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	TRIWULAN IV		
					T	R	%
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100	100	100	100%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82	82	95,4	116,34%
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82	82	98,33	119,91%
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	92	97,52	106,00%
		5	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95	95	96,76	101,85%
		6	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	85	85	89,96	105,84%
		7	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80	80	98	122,50%
		8	Persentase Keterseediaan Personel Armada Pengawasan (%)	75	75	83,80	111,73%
		9	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100	v100	100	100%
		10	Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya (%)	82	82	90	109,76%
3	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	11	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (IKU)	100	100	100	100%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	TRIWULAN IV		
					T	R	%
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81	81	87,11	107,54%
		13	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	86	86	89,65	104,24%
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100	100%
		15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26%
		16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80	80	86,54	108,18%
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80	80	83,23	104,04%
		18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA(nilai)	77	77	88,13	114,45%
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70	70	86,09	122,98%

B A B

01

PENDAHULUAN



Latar Belakang



Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ini.

Seiring penguatan tata kelola, pilar pengawasan kini semakin kokoh dengan kewenangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Dengan cakupan wewenang yang komprehensif tersebut, sistem pengawasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak lepas dari sinergi dan kinerja optimal berbagai direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Di antara jajaran tersebut, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menempati posisi yang sangat strategis. Dengan mandat besar mencakup penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, hingga pengoperasian armada matra laut dan udara serta operasional pusat kendali, peran Direktorat POA menjadi poros penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Untuk menjalankan tugas besar tersebut secara andal, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang komprehensif. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, Direktorat POA juga diwajibkan untuk menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran atas hasilnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja selama periode berjalan, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif yang berharga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.



Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan IV Tahun 2025 disusun dengan tujuan yaitu:



Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.



Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tantangan Pengawasan Tahun 2025

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pengendalian operasi armada, antara lain:

1. Praktik IUU fishing yang masih terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan (slavery) dan perdagangan orang (people smuggling) diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan SDKP lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.
4. Harga BBM dunia terus yang sangat fluktuatif, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas berpotensi mengalami koreksi dan bahkan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dapat berdampak pada kemampuan pengawasan.



Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hingga triwulan IV 2025, Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Subbag Tata Usaha. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan

5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.



Sistematika Penyajian

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2025 serta sistematika penyajian laporan.

Pendahuluan

**BAB
I**

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2025- 2029 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2025.

*Perencanaan
Kinerja*

**BAB
II**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2025.

*Akuntabilitas
Kinerja*

**BAB
III**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

Penutup

**BAB
IV**

**Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Direktorat
POA secara garis besar
diuraikan sebagai berikut:**

B A B 02

PERENCANAAN KINERJA





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saiful Umam**

Jabatan : **Direktur Pengendalian Operasi Armada**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : **Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

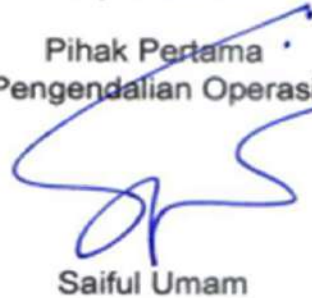
Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		11	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	87
		14	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88
		15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	254,086,365,000
SK 1.1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		254,086,365,000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saiful Umam**

Jabatan : Direktur Pengendalian Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		5	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		6	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	85
		7	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		8	Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan (%)	75
		9	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		10	Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya (%)	82
3	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	11	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (IKU)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81
		13	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	86
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		16	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA(nilai)	77
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	245.879.080.000
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.3	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	
SK 1.4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		245.879.080.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama

Direktur Pengendalian Operasi Armada


Pung Nugroho Saksono


Saiful Umam

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja sebagaimana tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dialokasikan anggaran Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran. Direktorat POA 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (000)	VOLUME
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		242,067,420	
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	26,287,969	11 Unit
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	192,843,455	59 Hari Operasi
3	QHD. 002. Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	22,935,996	76 Hari Operasi
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikananv		1,676,927	
4	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1,280,385	1 Unit
5	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	396,542	752 Produk
2355. Dukungan Manajerial		1.951.733	
6	EBA. Dukungan Manajerial	1.951.733	12 Layanan
TOTAL PAGU		245.879.080	



B A B

03

**AKUNTABILITAS
KINERJA**



Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA TW IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 106,42% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna HIJAU dengan kategori BAIK. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian inerja Direktorat POA Triwulan IV 2025

[illegible]

Sumber: kinerjaku.KKP.go.id, Januari 2026

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

 Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat dan Terintegrasi

 01 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

Indikator Kinerja “Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPPNRI” bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap aktivitas atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kegiatan yang dipantau antara lain: Aktifitas kapal perikanan berizin pusat WPPNRI, Aktivitas kapal di kawasan konservasi, Kejadian pencemaran perairan, Pemanfaatan ruang laut dan Aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi. Direktorat POA memastikan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan antara lain:

a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) Automatic Identification System (AIS), c) Citra Satelit, d) Air Surveillance (foto udara) dan e) SMS/WA Gateway. Sekurang kurangnya dalam sebulan terpantau dengan salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 1 Direktorat POA periode Triwulan IV Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-1 TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 1 pada TW IV dapat dicapai secara maksimal. Capaian pada periode triwulan IV tahun 2025. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru ditahun 2025. Adapun capaian dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Formula:

$x = (x1/x2) \cdot 100\%$

Keterangan:

x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

x2: Jumlah WPP NRI

X1 =

X2 =

Capaian

11 WPPNRI

11 WPPNRI

TW III

=

=

(11/11)x 100% = 100%



Gambar 4 Ilustrasi Pemantauan menggunakan SPKP periode Triwulan IV 2025



Gambar 5 Ilustrasi Pemantauan menggunakan AIS periode Triwulan IV 2025



Gambar 6 Kawasan Konservasi yang dipantau periode Oktober - Desember 2025

Tabel 4 Cakupan WPPNRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)
menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
TRIWULAN IV 2025

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Okt	Nov	Des	
1	WPP NRI 571				Terpenuhi
2	WPP NRI 572				Terpenuhi
3	WPP NRI 573				Terpenuhi
4	WPP NRI 711				Terpenuhi
5	WPP NRI 712				Terpenuhi
6	WPP NRI 713				Terpenuhi
7	WPP NRI 714				Terpenuhi
8	WPP NRI 715				Terpenuhi
9	WPP NRI 716				Terpenuhi
10	WPP NRI 717				Terpenuhi
11	WPP NRI 718				Terpenuhi

Tabel 5 Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)
menggunakan Automatic Identification System (AIS)
TRIWULAN IV 2025

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Okt	Nov	Des	
1	WPP NRI 571				Terpenuhi
2	WPP NRI 572				Terpenuhi
3	WPP NRI 573				Terpenuhi
4	WPP NRI 711				Terpenuhi
5	WPP NRI 712				Terpenuhi
6	WPP NRI 713				Terpenuhi
7	WPP NRI 714				Terpenuhi
8	WPP NRI 715				Terpenuhi
9	WPP NRI 716				Terpenuhi
10	WPP NRI 717				Terpenuhi
11	WPP NRI 718				Terpenuhi



02 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan digital form pada tools Survei Kepuasan (Aplikasi SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SUSAN. Aplikasi SUSAN KKP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen digital yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.



2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan penerbitan SKAT sekaligus dapat memantau kapal perikanan miliknya.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

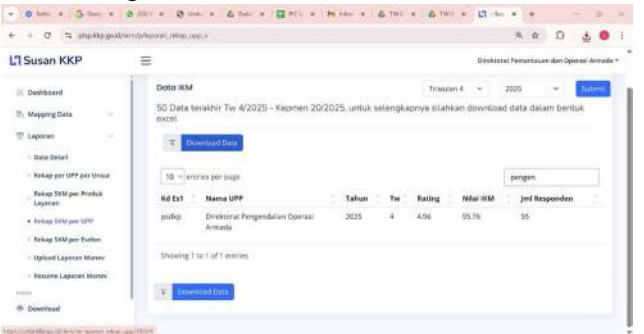
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 2 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	80	92,34	115,43	80	88,67	112,09	81	97,05	119,81	82	95,4	116,3	82	83	84	85	86

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,4 dari target sebesar 82 sehingga persentase capaian sebesar 116,3%. Sejak Triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan inovasi pelayanan SPKP melalui aplikasi SALMON Kilat dimana penerbitan layanan SPKP semakin mudah dan cepat, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SALMON Kilat tersebut, sehingga perlu dilakukan publikasi terkait mekanisme dan panduan penggunaan SALMON Kilat.



Potret hasil survei kepuasan masyarakat periode TW IV Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi SUSAN KKP sebagai berikut :



Gambar 7 Tangkapan Layar Aplikasi SUSAN KKP

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP pada Triwulan IV 2025 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan SPKP sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan SPKP;
3. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp396,542,000,00 dan sampai dengan TW IV tahun 2025 telah anggaran. terealisasi sebesar Rp360,444,500 atau 99,84% dari alokasi.

Indikator Kinerja “Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA periode Triwulan IV Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU-3 Triwulan IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP							81	100	123,36	83	98,33	119,92	82	82	83	83	84

Pada Triwulan IV, target IKU 3 berhasil dilampaui. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 3,44% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya permintaan data untuk mendukung operasi kapal pengawas dan air surveillance pada bulan Februari 2025. Hal tersebut berdampak pada capaian Triwulan IV karena perhitungan IKU yang bersifat kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Adapun indeks 98,33 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8. Komponen Perhitungan IKU 3

PERHITUNGAN CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN SISTEM PEMANTAUAN DAN INFORMASI INTELJEN SDKP TRIWULAN III TAHUN 2025																
No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan (%)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Pengolahan Data Kapal Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40		40,00
2	Pengolahan Data Kapal Perikanan di Wilayah Koordinasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		20,00
3	Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		20,00
4	Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20		18,33
Indeks															98,33	
															Target	82,00
															Persentase terhadap target	119,92%

Berdasarkan tabel diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukkan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 4. Sedangkan angka 0 menunjukkan tidak terpenuhi data realisasi perkomponen pada IKU 4.



Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Air Surveillance.

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan berupa lembar Indikasi Pelanggaran dan diberikan memo penyampaian setiap harinya kepada UPT terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Untuk diketahui, sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 2.538 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Desember 2025

Bulan	DPI	DPI (laut lepas)	Jalur Penangkapan	Pelabuhan Pangkal/Muat	Poaching	Tanpa SIP/SIKPI	Alih Muat	Kawasan Konservasi
Januari	129	1	182	45	75		4	3
Februari	100	4	179	44	22		7	19
Maret	52	2	179	29	3	1		21
April	78		97	6	8	1	5	10
Mei	53	3	106	4	4			15
Juni	29	1	73	14	14		1	5
Juli	19	2	95	10	2			6
Agustus	19	3	44	5	9		2	4
September	34	1	55	2	8			4
Oktober	89	5	84	15	6	1		3
November	94	3	67		4			4
Desember	65	3	114	16	11		1	1

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 14 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 10 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Oktober 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara	1
2	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara	1
TOTAL		2

Tabel 11 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan November 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara	2
2	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara	1
3	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan	1
TOTAL		4

Tabel 12 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Desember 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara	1
2	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tapanuli Tengah dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara	2
TOTAL		2

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap kapal pengangkut ikan hidup yang terpantau aktif pada bulan Januari sd September 2025.

Tabel 13 Jumlah Pemantauan Kapal Pengangkut Ikan Hidup s.d bulan September 2025

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	37 Kapal
2	Februari	41 Kapal
3	Maret	39 Kapal
4	April	35 Kapal
5	Mei	36 Kapal
6	Juni	37 Kapal
7	Juli	38 Kapal
8	Agustus	38 Kapal
9	September	39 Kapal
10	Oktober	40 Kapal
11	November	39 Kapal
12	Desember	37 Kapal

4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas dan Air Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan air surveillance. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap periode pemantauan.

Tabel 14 Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi s.d bulan Desember 2025

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen
1	Januari	Air Surveillance dan Operasi KP	26 Januari 2025	11 WPPNRI	1
2	Februari	Air Surveillance dan Operasi KP	-	-	0
3	Maret	Air Surveillance dan Operasi KP	20 Maret 2025	WPP NRI 711	1
4	April	Air Surveillance dan Operasi KP	8 April 2025	WPP NRI 571, 711, 712	2
			14 April 2025	WPP NRI 573, 714	
			15 April 2025	WPP NRI 716, 717	
			28 April 2025	WPP NRI 711, 718	
		Operasi pengawasan oleh UPT	23 April 2025	WPP NRI 714, 715	1
5	Mei	Air Surveillance dan Operasi KP	6 Mei 2025	WPP NRI 573, 713	2
			7 Mei 2025	WPP NRI 714, 716, 717	
			8 Mei 2025	WPP NRI 573, 712	
			15 Mei 2025	WPP NRI 711, 712, 714, 718	
			19 Mei 2025	WPP NRI 711	
			22 Mei 2025	WPP NRI 712	
		Operasi pengawasan oleh UPT	6 Mei 2025	WPP NRI 712	1
6	Juni	Air Surveillance dan Operasi KP	3 Juni 2025	WPP NRI 572, 573, 715, 716	2
			19 Juni 2025	WPP NRI 715, 716, 717	
			24 Juni 2025	WPP NRI 573, 711, 712, 714, 715	

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen
6	Juni	Air Surveillance dan Operasi KP	3 Juni 2025	WPP NRI 572, 573, 715, 716	2
			19 Juni 2025	WPP NRI 715, 716, 717	
			24 Juni 2025	WPP NRI 573, 711, 712, 714, 715	
7	Juli	Air Surveillance dan Operasi KP	2 Juli 2025	WPP NRI 716	4
			7 Juli 2025	WPP NRI 711	
			11 Juli 2025	WPPNRI 572 dan 717	
			15 Juli 2025	WPP NRI 712	
			21 Juli 2025	WPP NRI 711, 715, 716	
			22 Juli 2025	WPP NRI 571	
			24 Juli 2025	WPP NRI 711	
			30 Juli 2025	WPPNRI 713,714,715,716	
			31 Juli 2025	WPPNRI 711 dan 715	
8	Agustus	Air Surveillance dan Operasi KP	4 Agustus 2025	WPP NRI 711	3
			6 Agustus 2025	WPP NRI 712	
			7 Agustus 2025	WPPNRI 572, 573, 716, 717	
			4 Agustus 2025	WPPNRI 716	
			25 Agustus 2025	WPPNRI 711, 712	
			27 Agustus 2025	WPPNRI 714, 715 dan 718	
9	September	Air Surveillance dan Operasi KP	1 September 2025	WPPNRI 571, 573, 714, 715, 716,7 17	2
			8 September 2025	WPPNRI 716, 717	
			9 September 2025	WPPNRI 718	
			11 September 2025	WPPNRI 711	
			12 September 2025	WPPNRI 712	
			18 September 2025	WPPNRI 718	
10	Oktober	Air Surveillance dan Operasi KP	1 Oktober 2025	WPPNRI 711 dan 712	2
			4 Oktober 2025	WPPNRI 712 dan 713	
			30 Oktober 2025	WPPNRI 711 dan 712	
11	November	Air Surveillance dan Operasi KP	11 November 2025	WPPNRI 711, 715, 716 dan 717	3
			16 November 2025	WPPNRI 712, 713, dan 715	
			17 November 2025	WPPNRI 716	
			24 November 2025	WPPNRI 571, 573, 711, 712, 713, 716 dan 717	
			25 November 2025	WPPNRI 573	
			26 November 2025	WPPNRI 718	
			27 November 2025	WPPNRI 714	
12	Desember	Air Surveillance dan Operasi KP	10 Desember 2025	WPPNRI 712	1
Total					25

Keberhasilan pencapaian target IKU ini merupakan hasil dari terpenuhinya seluruh komponen pendukung serta pelaksanaan tugas secara optimal oleh Direktorat Pengelolaan Operasi Armada, khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kapal Pengawas. Kontribusi tersebut diperkuat oleh keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, yang berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta keberlanjutan capaian kinerja secara menyeluruh.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 3 sampai dengan TW IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 520,746,688 atau sebesar 99,80% dari alokasi anggaran.

99,80%

Anggaran

Realisasi



Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

04

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 4 variabel, dengan rincian sebagai berikut



Tabel 15. Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85	91,57	107,73	87,6	95,40	108,9	91	97,26	106,88	92	97,52	106,00	92	92,25	92,50	92,75	93

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) tercatat sebesar 97,52, melampaui target tahunan sebesar 92 dengan tingkat capaian 106%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tetap berada pada kategori sangat baik, meskipun dihadapkan pada dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya pada tahun berjalan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 97,26, terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,26 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Peningkatan capaian kinerja tersebut didukung oleh penguatan tata kelola operasional, antara lain melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin, peningkatan koordinasi dan sinergi operasi pengawasan, serta pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar penentuan rencana operasi. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 89, capaian Tahun 2025 mencapai 109,57 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan tidak hanya memenuhi sasaran strategis, tetapi juga dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.



Gambar 8. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (Henrikhan) Kapal Ikan Asing oleh Kapal Pengawas

Sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun 2025, Kapal Pengawas telah melaksanakan kegiatan operasi pengawasan selama 834 hari operasi yang melibatkan 10 unit Kapal Pengawas. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Kapal Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap 2.461 kapal, yang terdiri dari 2.350 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 11 Kapal Ikan Asing (KIA). Intensitas pemeriksaan bervariasi antar kapal pengawas, dengan kontribusi pemeriksaan terbesar berasal dari KP. ORCA 05, KP. ORCA 06, dan KP. PAUS 01, seiring dengan tingginya hari operasi yang dilaksanakan.

Dari total pemeriksaan tersebut, Kapal Pengawas berhasil melakukan penangkapan terhadap 158 kapal, yang terdiri atas 150 KII dan 8 KIA. Penangkapan kapal perikanan ini merupakan hasil dari pengawasan yang dilaksanakan secara selektif dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan operasi pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Tabel 16. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW IV Tahun 2025

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP			RIKSA OBJEK SDK	RUMPON
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1	KP. ORCA 01	29	176	0	176	40	0	40	0	0
2	KP. ORCA 02	87	288	0	288	10	0	10	16	0
3	KP. ORCA 03	70	212	3	215	1	2	3	9	0
4	KP. ORCA 04	100	271	3	274	7	2	9	14	80
5	KP. ORCA 05	128	358	0	358	63	0	63	33	4
6	KP. ORCA 06	102	305	1	306	9	1	10	9	20
7	KP. BARAKUDA 01	51	199	2	201	5	2	7	2	0
8	KP. BARAKUDA 02	84	314	1	315	8	0	8	10	0
9	KP. PAUS 01	106	266	1	267	3	1	4	19	0
10	KP. AKAR BAHAR 01	77	61	0	61	4	0	4	81	0
		834	2350	11	2461	150	8	158	193	104

Beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan operasi kapal pengawas Ditjen PSDKP tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola operasi melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga ketercapaian IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas. Pelaksanaan monev pada setiap akhir operasi memastikan seluruh kegiatan pengawasan berjalan sesuai rencana dan sasaran strategis. Mekanisme ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan operasi.

2. Optimalisasi sinergi dan operasi bersama mendukung peningkatan efektivitas pengawasan serta berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja dan sasaran strategis peningkatan kepatuhan sektor kelautan dan perikanan.

3. Efisiensi operasional Kapal Pengawas melalui pemanfaatan listrik darat (shore power) memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran dan keberlanjutan operasi. Efisiensi penggunaan BBM memungkinkan optimalisasi hari operasi kapal pengawas. Langkah ini secara langsung mendukung pencapaian IKU Indeks Operasi secara efektif.

4. Pemanfaatan data dan informasi pengawasan secara terintegrasi memastikan pelaksanaan operasi kapal pengawas lebih terarah. Pendekatan ini meningkatkan kualitas pemeriksaan dan efektivitas patroli. Hal tersebut sejalan dengan sasaran strategis penguatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini Rp192.843.455.000,00 dan sampai dengan TW IV Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 187.500.189.000,00 atau 97,23% dari total pagu.

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

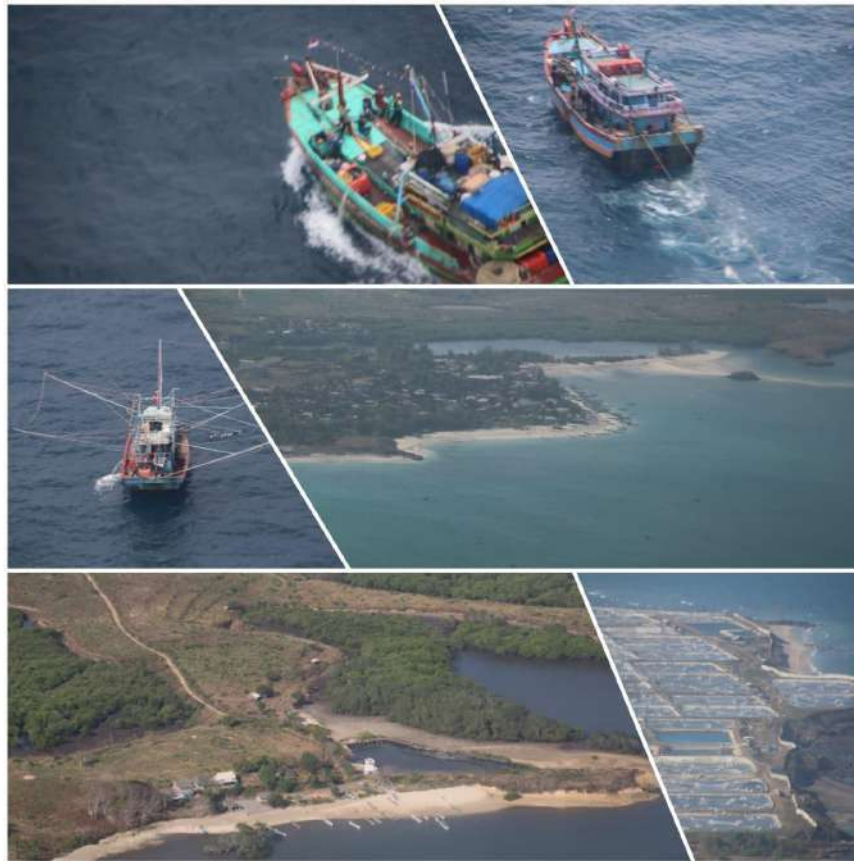
1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	92	95,46	103,76	93	98,72	106,15	94	97,74	103,97	95	96,76	101,85	95	95,25	95,50	95,75	96

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli mencapai realisasi sebesar 96,76, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95, dengan persentase capaian sebesar 101,85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja operasi pesawat patroli tetap berada pada kategori baik dan berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Meskipun persentase capaian lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai realisasi sebesar 97,74 atau persentase capaian sebesar 103,97%, pelaksanaan pengawasan udara Tahun 2025 tetap mampu menjaga efektivitas pengawasan secara terukur dan akuntabel. Jika dibandingkan dengan target renstra indeks sebesar 95, capaian tahun 2025 melampaui target.





Gambar 9. Dokumentasi Kapal Perikanan dan Objek SDK yang Dipantau Oleh Operasi Pesawat Patroli

Penurunan nilai capaian dipengaruhi oleh adanya penyesuaian kebijakan efisiensi dan blokir anggaran sejak awal tahun, yang berdampak pada berkurangnya jumlah hari operasi serta rata-rata jam terbang pesawat patroli. Kondisi tersebut mengharuskan pelaksanaan patroli udara dilakukan secara lebih selektif dan berbasis prioritas risiko, sehingga capaian indikator kuantitatif seperti jumlah kapal yang divalidasi dan luas area pemantauan tidak setinggi tahun sebelumnya.

Namun demikian, keterbatasan tersebut dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan jam terbang yang tersedia serta penguatan dukungan data dan informasi pengawasan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, pesawat patroli juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan, SAR, dan sinergi program kementerian sebagai bagian dari optimalisasi aset negara.

Selama periode operasi TW IV Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) periode operasi dengan total jumlah hari operasi sebanyak 167 hari operasi. Adapun hasil capaian operasi Pesawat Patroli sampai dengan TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Wilayah dan Hari Operasi s.d. Triwulan IV 2025

NO	PERIODE	WILAYAH OPERASI (WPPNRI)	HARI OPERASI
1	I	711, 712, 713, 573, 572	7
2	I-A	711, 712	6
3	II	712	5
4	II-A	716, 717, 715	10
5	III	572, 711, 573	4
6	III - A	712, 713, 573	4
7	IV	712	1
8	IV-A	711, 712, 573	3
9	V	712, 713, 715, 716	3
10	V-A	716, 717, 715, 712	5
11	V-B	712, 711	7
12	VI	573, 717, 716, 712	11
13	VI-A	712	4
14	VII	712	1
15	VII-A	712, 711, 573	11
16	VIII-A	711, 712, 713, 714, 715, 716	10
17	VIII-B	711	2
18	IX	711	2
19	IX-A	571, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 573	11
20	IX-B	712	5
21	X	712	3
22	X-A	713, 715, 714, 711	17
23	X-B	712, 571, 711	6
24	XI	712	1
25	XI-A	712, 573, 571	15
26	XI-B	711, 712, 571	5
27	XII	712, 571, 711	1
28	XII-A	712, 713, 711	4
29	XII-B	712	3
JUMLAH			167

Dalam pelaksanaan operasi Pesawat Patroli Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pelaksanaan operasi Pesawat Patroli Tahun 2025 dilaksanakan dalam kondisi adanya penyesuaian kebijakan anggaran, termasuk efisiensi dan blokir anggaran sejak awal tahun, yang berdampak pada pengurangan jumlah hari operasi dan rata-rata jam operasi. Selain itu, sebagian jam operasi juga dialokasikan untuk dukungan kegiatan kemanusiaan, SAR, dan sinergi program prioritas kementerian, sebagai bagian dari optimalisasi pemanfaatan aset udara negara. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan menuntut penyesuaian pola operasi agar pengawasan udara tetap efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja.
2. Penguatan perencanaan dan pengendalian operasi pesawat patroli menjadi faktor utama dalam menjaga ketercapaian IKU Indeks Operasi Pesawat Patroli Tahun 2025. Meskipun terdapat keterbatasan hari dan jam operasi, pelaksanaan patroli udara tetap diarahkan secara selektif dan berbasis risiko. Pendekatan ini memastikan capaian kinerja tetap melampaui target yang ditetapkan.
3. Penurunan realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh belum sepenuhnya konsistennya fokus pergerakan pesawat patroli pada seluruh wilayah prioritas dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi, termasuk WPPNRI dengan indikasi IUUF dan KIA yang signifikan, serta wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi bernilai strategis. Ke depan, konsistensi dan peningkatan intensitas pengawasan pada dua fokus tersebut akan menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas operasi dan mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.
4. Pemanfaatan data dan informasi pengawasan secara terintegrasi, termasuk dari Command Center Ditjen PSDKP dan sumber relevan lainnya, juga memperkuat akurasi penentuan target patroli udara. Dukungan informasi tersebut memungkinkan operasi tetap efektif dalam melaksanakan validasi kapal perikanan.

Pada Tahun Anggaran 2025, dukungan anggaran untuk pelaksanaan operasi pesawat patroli dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dialokasikan melalui kegiatan QHD 002 (Operasi Pesawat Patroli) dengan pagu awal sebesar Rp40.000.000.000,00. Setelah dilakukan penyesuaian berupa blokir anggaran, pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp22.559.796.000,00, dengan tingkat realisasi hingga akhir tahun mencapai 99,94%.

Selain itu, dukungan operasi pesawat patroli juga diperkuat melalui sinergi pengawasan udara dan laut dalam kerangka Integrated Surveillance System yang didukung oleh kegiatan QHD 001 (Operasi Kapal Pengawas) dengan pagu efektif sebesar Rp35.119.400.000,00 dan realisasi sebesar 99,97%, serta kegiatan RCG 001 (Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat) dengan pagu efektif sebesar Rp2.427.000.000,00 dan realisasi sebesar 98,32%.

Secara keseluruhan, total pagu efektif yang dimanfaatkan untuk mendukung operasi pesawat patroli pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp60.106.196.000,00, dengan total realisasi sebesar Rp60.041.350.702,00 atau setara dengan 99,89%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP



Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan menggunakan Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) sebagai instrumen pengukuran kinerja. Indikator tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan logistik utama guna mendukung kelancaran operasi armada pengawasan, yang diukur melalui komponen pemenuhan kebutuhan BBM (30%), Pelumas (20%), Bahan Makanan Awak Kapal Pengawas (25%), Air Tawar (15%), Alat Pelayanan (5%), dan Senjata Api (5%). Untuk Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW I s.d III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 20.

Selanjutnya, pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (Indeks). Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan metode pengukuran kinerja agar lebih komprehensif, dengan tidak hanya menilai tingkat pemenuhan logistik secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas layanan, ketepatan waktu, dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Adapun capaian IKU ke 6 pada triwulan IV ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 6 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	89,96	105,84	85	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas pada TW IV sebesar 89,96% melebihi dari target 85%. Sehubungan dengan IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 maka capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2025 (85%) capaian kinerja berhasil melampaui target yaitu (89,96%). Capaian ini dapat diwujudkan atas kolaborasi dan kerja keras seluruh jajaran Direktorat POA dalam pemenuhan logistik operasi kapal pengawas. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut :



Tabel 20. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Per Unsur Produk Layanan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan

No.	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang per Unsur
1	Ketersediaan dan Kelengkapan Logistik	4,47	0,26
2	Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman	4,41	0,26
3	Kualitas Pelayanan dan Komunikasi	4,57	0,26
4	Prosedur dan Administrasi	4,54	0,27
5	Kompetensi Tim Logistik	4,45	0,26
6	Penanganan Masalah/Keluhan	4,44	0,26
7	Kepuasan Secara Keseluruhan	4,67	0,27
NRR tertimbang / NRR per unsur		4,51	
Nilai Survey Kepuasan Pelayanan		89,96	

Beberapa kegiatan pemenuhan logistik Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat POA sebagai berikut:

Beberapa kegiatan pemenuhan logistik Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat POA sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah ditetapkan;



2. Pemenuhan minyak pelumas mesin induk / mesin bantu dalam rangka menjaga mesin tetap terjaga kualitasnya. Berikut kegiatan penyediaan logistik minyak pelumas Kapal Pengawas sebagai berikut :

a. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Orca 01 sebanyak 3 drum dan 10 Pail yang diterima di Pelabuhan Nizam Zachman;

b. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Orca 05 sebanyak 32 drum dan 3 Pail yang diterima di Pelabuhan Bungus Kota Padang Sumatera Barat;

c. Terpenuhi Proses pengajuan pembayaran Pembelian Minyak Pelumas KP. Orca 01 di Muara Baru sebanyak 3 drum;

d. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Paus 01 di Sorong sebanyak 10 pail dan Coolant sebanyak 4 pail;

e. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Orca 04 sebanyak 10 drum dan 10 Pail yang diterima di Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung;

f. Terpenuhi Proses pengajuan pembayaran Pembelian Minyak Pelumas KP. Paus 01 di Pelabuhan Perikanan Sorong sebanyak 10 pail dan water Coolant sebanyak 4 pail;

g. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Barakuda 02 sebanyak 17 pail (20 liter) yang diterima di Dermaga Pelabuhan Perikanan Indonesia Galala Ambon;

h. Terpenuhi Minyak Pelumas KP. Orca 01 sebanyak 2 drum (209 liter) yang diterima di Dermaga Pelabuhan Nizam Zachman di Muara Baru.



3. Kegiatan penyediaan logistik personel meliputi pemenuhan logistik bahan makanan dan pemenuhan logistik air bersih pada 10 Kapal Pengawas lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada;



4. Kegiatan penyediaan logistik personel meliputi pemenuhan logistik pemenuhan logistik air bersih pada 10 Kapal Pengawas lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada



5. Melakukan Monitoring dan Verifikasi Laporan Bulanan Amunisi sebanyak 34 Kapal Pengawas. Adapun output yang dihasilkan tercapainya Dokumen Laporan bulanan Rekapitulasi Amunisi sebanyak 34 Kapal Pengawas lingkup Ditjen PSDKP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan pengendalian pencatatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Ditjen PSDKP terkait dengan barang persediaan amunisi (peluru) yang bertujuan :

- Mengetahui stok terkini persediaan barang secara berkala;
- Memudahkan perhitungan pada laporan keuangan;
- Meminimalkan risiko kehilangan barang baik akibat kelalaian;
- Untuk menghasilkan data yang akurat sesuai antara pembukuan dengan stok fisik di lapangan; dan
- Memudahkan pengambilan keputusan saat terdapat barang rusak ataupun tidak layak .

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Komitmen dari Direktur Pengendalian Operasi Armada dalam kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mendukung kegiatan tersebut Direktorat POA memaksimalkan ketersediaan logistik Kapal Pengawas.
- Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK).
- Penyediaan logistik Kapal Pengawas dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
- Adanya peningkatan kualitas layanan dan komunikasi dengan kapal pengawas.
- Peningkatan kompetensi tim penyedia logistik kapal pengawas Direktorat POA.

Total anggaran BBM Kapal Pengawas per 30 September 2025 sebesar Rp.128.816.243.000 dengan pagu efektif Rp.105.125.301.000 dan realisasi sebesar Rp.68.304.415.000 dengan rincian sebagai berikut.

NO	RUPIAH MURNI (RM) (Rp.)	PNBP AKTIP (63,16%) (Rp.)	PNBP BLOKIR (36,84%) (Rp.)	TOTAL PAGU EFEKTIF (Rp.)	TOTAL PAGU (Rp.)
1	64.514.301.000	40.611.000.000	23.690.942.000	105.125.301.000	128.816.243.000
2	REALISASI			68.304.415.000	68.304.415.000
3	SISA			36.820.886.000	60.511.828.000



07 Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.

Berdasarkan data Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) tahun 2025, hasil analisa terhadap lima aspek utama yaitu pendidikan, keahlian, keterampilan kepelautan, hasil pemeriksaan kesehatan (MCU) dan jumlah pemegang kartu izin penguasaan pinjam pakai senjata (Pengpin) pada 377 Awak Kapal Negara Ditjen PSDKP yang berstatus PNS, menunjukkan gambaran umum kesiapan personel dalam mendukung operasi pengawasan laut.

Dari sisi pendidikan, mayoritas AKP telah memenuhi kualifikasi minimum bidang kelautan/perikanan, yang mencerminkan kesiapan dasar dalam aspek akademik dan teknis dengan nilai 187. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mendukung tugas-tugas strategis pengawasan sumber daya kelautan.

Pada aspek keahlian dan keterampilan kepelautan, terlihat bahwa sebagian besar personel telah memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini mencerminkan kompetensi yang cukup baik dalam penguasaan teknis operasional kapal dan pemahaman terhadap prosedur keamanan dan keselamatan di laut dengan capaian nilai pada keahlian kepelautan 73 dan nilai keterampilan kepelautan 26,65. Namun demikian, masih terdapat disparitas atau perbedaan mencolok nilai antar individu yang mengindikasikan perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas pelatihan dikarenakan adanya CPNS baru sejumlah 27 AKP.

Dari sisi pendidikan, mayoritas AKP telah memenuhi kualifikasi minimum bidang kelautan/perikanan, yang mencerminkan kesiapan dasar dalam aspek akademik dan teknis dengan nilai 187. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mendukung tugas-tugas strategis pengawasan sumber daya kelautan.

Pada aspek keahlian dan keterampilan kepelautan, terlihat bahwa sebagian besar personel telah memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini mencerminkan kompetensi yang cukup baik dalam penguasaan teknis operasional kapal dan pemahaman terhadap prosedur keamanan dan keselamatan di laut dengan capaian nilai pada keahlian kepelautan 73 dan nilai keterampilan kepelautan 26,65. Namun demikian, masih terdapat disparitas atau perbedaan mencolok nilai antar individu yang mengindikasikan perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas pelatihan dikarenakan adanya CPNS baru sejumlah 27 AKP.

Gambar 10. Peningkatan Kompetensi Keterampilan SSO dan SDSD



Pada tahun 2025, capaian Indeks Kesiapan untuk aspek Medical Check Up (MCU) bagi Awak Kapal Negara pada 34 kapal tercatat mencapai nilai 35,9 dari target yang telah ditetapkan sebesar 37,7. Berdasarkan hasil tersebut, capaian ini dinilai belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya AKP yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat melaksanakan MCU. Selisih capaian dengan target menunjukkan masih adanya faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh AKP. Data dapat dilihat pada link berikut : https://bit.ly/MCU_AKN2025.



Gambar 11. MCU AKP

Pemenuhan izin Kartu Penguasaan Pinjam Pakai Senjata (Pengpin) bagi AKP telah terlaksana secara optimal dengan capaian 100%, mencakup sebanyak 377 AKP setelah melaksanakan psikotest senjata dan penyegaran kemampuan teknis menembak bagi AKP tahun 2025 yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni Batam - Kepulauan Riau dan Bitung – Sulawesi Utara. Seluruh AKP yang memiliki kewenangan penggunaan senjata api telah dilengkapi izin Pengpin sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjamin legalitas, keamanan, dan akuntabilitas dalam penguasaan serta penggunaan senjata. Capaian ini mencerminkan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen kuat dalam mendukung kesiapan operasional dan pengamanan tugas AKP secara profesional dan bertanggung jawab



Gambar 12. Psikotest Pemegang Senjata bagi AKP



Gambar 13. Penyegaran kemampuan teknis menembak bagi AKP tahun 2025

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode TW IV Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas				70	93,76	113,94	79	94,68	119,85	85	89,96	105,84	80	80	80	80	80

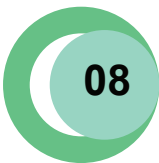
Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,84% dengan indeks 89,96 dari taget indeks 85. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 terdapat. penurunan sebesar 14,01. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan dan pembinaan awak kapal pengawas.



Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi Awak Kapal Pengawas.
2. Telah mengajukan daftar nama awak kapal yang akan melaksanakan peningkatan pendidikan (Izin Belajar) dan peningkatan sertifikasi keahlian Pelaut bagi AKP.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini Rp4.580.972.000,- dan sampai dengan TW IV Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.579.919.232,- atau 99,98%.



08 Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan

Persentase ketersediaan personel Armada Pengawasan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kecukupan jumlah Awak Kapal Pengawas, baik dalam pelaksanaan operasi pengawasan di laut maupun dalam pemenuhan kebutuhan personel pada tugas jaga darat. Pengukuran ketersediaan tersebut didasarkan pada perbandingan antara jumlah personel yang tersedia dengan jumlah personel ideal sesuai kelas kapal, baik yang berada di bawah kendali Pusat maupun UPT di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan Direktorat POA periode Triwulan IV Tahun 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 8 pada periode TW IV tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	83,80	111,73%	75	77,5	80	82,5	85

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2025 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 111,73% dengan indeks 83,80 dari target indeks 75. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan IKU ketersediaan Personel Armada Pengawasan Direktorat POA merupakan IKU baru pada tahun 2025. Dibandingkan dengan target renstra, capaian pada periode TW IV tahun 2025 sebesar indeks 83,80 telah malampaui dari target rensta yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu indeks 75.

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Rencana operasi kapal pengawas telah memperhitungkan ketersediaan Awak Kapal Pengawas.
2. Koordinasi dengan para Nahkoda Kapal Pengawas dilakukan secara intensif dalam rangka pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas dalam pelaksanaan operasi.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini Rp4.580.972.000,- dan sampai dengan TW IV Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.579.919.232,- atau 99,98%.

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan “Laik Operasi”. Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas yang dilakukan oleh surveyor dari SBU Marine Service PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah ditinjau masuk dalam kategori “Laik Operasi” atau “Tidak Laik Operasi”.

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 9 pada periode TW IV tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sampai dengan periode Triwulan IV 2025 indikator tersebut telah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan nilai maksimal angka 5 (Baik). Kegiatan penilaian kondisi teknis kapal pengawas di Direktorat POA dilaksanakan oleh surveyor yang bersertifikat dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai badan klasifikasi resmi yang diakui di Indonesia.

Survei penilaian kondisi teknis oleh BKI terhadap kapal pengawas yang berada dibawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan dengan menggunakan metode Condition Assessment Programme (CAP), yaitu sebuah program penilaian kondisi kapal yang meliputi beberapa aspek seperti aspek konstruksi, permesinan, propulsi dan sistem pendukung lainnya dimana hasil penilaian kondisi kapal pengawas tersebut akan disajikan dalam format CAP Grading yang terbagi dalam 5 kategori dengan persentase nilai teknis yang berbeda-beda, dimana persentase nilai teknis tertinggi yaitu 95 - 100% dengan predikat “Very Good”.

Tabel 24. Metode Penilaian dengan Condition Assessment Programme

No	Kondisi	CAP Rating	Nilai Teknis	Keterangan
1	Poor (Buruk)	1 – 1,49	0,00% - 50,00%	Kapal membutuhkan perbaikan signifikan pada komponen utama atau keseluruhan sistemnya
2	Unsatisfactory (kurang memuaskan)	1,5 – 1,99	50,00% - 75,00%	Kapal memerlukan perbaikan signifikan pada beberapa komponen agar bisa beroperasi dengan lebih aman
3	Fair (cukup)	2 – 2,49	75,00% - 85,00%	Kapal dalam kondisi teknis yang memadai tetapi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan pada beberapa bagian agar dapat beroperasi lebih optimal
4	Good (Baik)	2,49 – 3,49	85,00% - 95,00%	Kapal memiliki kondisi teknis yang baik dengan mayoritas komponen utama berfungsi dengan optimal
5	Very Good (Sangat Baik)	3,5 - 4	95,00% - 100,00%	Kapal memiliki nilai teknis yang sangat baik, dengan seluruh komponen utama dalam kondisi prima dan berfungsi dengan sangat optimal

Sampai dengan akhir tahun 2025, surveyor dari BKI telah melakukan survei penilaian kondisi teknis pada 8 (delapan) unit kapal pengawas Direktorat POA yaitu sebagai berikut :

Tabel 25. Daftar Pelaksanaan Survei Kondisi Teknis Kapal Pengawas Tahun 2025

No	Nama Kapal	Lokasi	Tanggal	Hasil	Nilai IKU
1	KP Orca 01	Jakarta	09 Oktober 2025	88.20	5
2	KP Orca 02	Jakarta	07 Oktober 2025	88.90	5
3	KP Orca 03	Batam	16 Oktober 2025	88.99	5
4	KP Orca 04	Bitung	14 Oktober 2025	89.21	5
5	KP Orca 05	Jakarta	30 Oktober 2025	89.59	5
6	KP Orca 06	Kupang	16 Oktober 2025	89.52	5
7	KP Barakuda 01	Batam	03 Oktober 2025	89.96	5
8	KP Barakuda 02	Ambon	06 Oktober 2025	89.02	5

Selanjutnya, untuk penilaian 2 (dua) kapal pusat lainnya dapat dilihat dari nilai laporan kondisi teknis kesiapan KP :

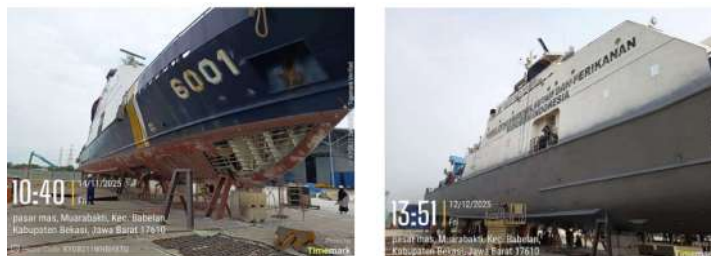
Tabel 26. Daftar Laporan Kondisi Teknis KP

No	Nama Kapal	Hasil	Nilai IKU
1	KP Paus 01	95.00	5
2	KP Akar Bahar	99.00	5

Selain kegiatan tersebut di atas, pada periode Triwulan IV terdapat pekerjaan docking kapal pengawas yang dilaksanakan di 3 (tiga) kapal yaitu KP Orca 01, KP Orca 02, dan KP Orca 03. Pekerjaan docking ini dilaksanakan dalam rangka menjaga agar armada tetap laik dan siap operasi.

No	Nama Pekerjaan & Pelaksana	Waktu	Keterangan
1	Docking KP Orca 01 Pelaksana : PT Tesco Indomaritim Babelan, Bekasi, Jawa Barat	13 Oktober s.d 26 Desember 2025	Pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu
2	Docking KP Orca 02 Pelaksana : PT Bayubahari Sentosa Tj.Priok, Jakarta Utara	16 Oktober s.d 29 Desember 2025	Pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu
3	Docking KP Orca 03 Pelaksana : PT Tesco Indomaritim Babelan, Bekasi, Jawa Barat	3 Novober s.d 31 Desember 2025	Pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu

Gambar 14. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca 01



Gambar 15. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca 02



Gambar 16. Dokumentasi pekerjaan docking KP Orca 03



Dalam rangka mencapai target IKU 9, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya yaitu:

1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat serta memastikan rencana tersebut terlaksana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.
2. Memperkuat dan meningkatkan intensitas monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas melalui koordinasi dengan pelaksana pekerjaan secara berkala.
3. Mengelola dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan.
4. Melakukan supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil pemeliharaan dan perawatan dan melakukan validasi pada detail dan hasil pekerjaan di lapangan.
5. Senantiasa berkonsultasi dan membangun komunikasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait akuntabilitas pelaksanaan dan monitoring kegiatan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp.205.128.000,00.

Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di UPT.

Hasil pelaksanaan supervisi akan dituangkan dalam sebuah laporan hasil supervisi yang memuat informasi tentang evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah diselesaikan oleh UPT dengan pedoman pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan laporan kondisi teknis kapal pengawas dan laporan monitoring kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas oleh UPT Ditjen PSDKP.

1. Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan terkini mengenai keadaan teknis kapal sehingga dapat digunakan sebagai dasar ukuran tingkat kelaiklautan kapal, keselamatan operasi, perencanaan pemeliharaan dan perawatan serta menjamin kesiapan operasional kapal pengawas. Kapal pengawas dikatakan “siap” apabila nilai lebih atau sama dengan 75 dan kapal pengawas dikatakan “tidak siap” apabila nilai kurang dari 75. Adapun beberapa komponen yang dinilai sebagai berikut :

- Peralatan navigasi
- Peralatan komunikasi
- Perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran
- Konstruksi kapal
- Perlengkapan tambat labuh
- Pendingin ruangan
- Mesin utama dan mesin bantu
- Sistem propulsi dan kemudi
- Sistem perpompaan
- Peralatan persenjataan

Sampai dengan Triwulan IV ini telah dinilai 81 kapal pengawas dengan rincian 24 kapal pengawas kelas II dan III serta 57 kapal pengawas kelas IV dan V.



01/11/2025 15:41

Tabel 27. Lapkonis KP Kelas II dan III (UPT)

No	KP	Nilai	No	KP	Nilai
1	Hiu Macan Tutul 01	98	13	Hiu 06	98
2	Hiu Macan Tutul 02	97	14	Hiu 07	98
3	Hiu Macan 01	98	15	Hiu 08	99,85
4	Hiu Macan 03	96	16	Hiu 09	98
5	Hiu Macan 04	99	17	Hiu 10	99
6	Hiu Macan 05	98	18	Hiu 11	97
7	Hiu Macan 06	99,76	19	Hiu 12	96
8	Hiu 01	95,31	20	Hiu 13	98,58
9	Hiu 02	98	21	Hiu 14	95,27
10	Hiu 03	99	22	Hiu 15	99
11	Hiu 04	93	23	Hiu 16	99,81
12	Hiu 05	99	24	Hiu 17	100

2. Laporan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas

Laporan ini merupakan laporan berkala tentang pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah dilaksanakan oleh UPT PSDKP. Kegiatan tersebut mencakup :

a. perawatan pencegahan seperti perawatan rutin, docking, servis, analisis teknis dan pengecekan.

b. perawatan prediktif seperti perbaikan mesin, kalibrasi, penggantian plat kapal, suku cadang, perlengkapan kapal, penggantian mesin.

c. perawatan darurat seperti perbaikan kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi dan komunikasi, konstruksi, alat keselamatan dan pemadam kebakaran.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di UPT PSDKP dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.

Capaian IKU 10 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW IV tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 28. Target dan realisasi IKU 10 pada periode TW IV tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-	-	80	80	100	81	84,2	103,95	82	90	109,76	82	83	84	85	86

Pada Triwulan IV ini telah tercapai nilai supervisi sebesar 90 dari target 82 dengan presentase capaian sebesar 109,76%. Capaian melampaui target dikarenakan jumlah laporan penilaian kondisi teknis kapal pengawas yang disampaikan melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024, terdapat kenaikan dikarenakan jumlah laporan penilaian kondisi teknis kapal pengawas yang disampaikan melebihi target yang ditetapkan. Nilai diperoleh dari hasil supervisi terhadap 81 unit kapal pengawas dengan rincian 24 kapal pengawas kelas II dan III serta 57 kapal pengawas kelas IV dan V.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target realisasi IKU 10 antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan supervisi yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala, rutin, dan tepat waktu.

Sedangkan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi dan pencapaian IKU 10 yaitu rendahnya validasi dan verifikasi data hasil supervisi secara online, hal ini disebabkan karena Direktorat POA tidak bisa melakukan validasi dan verifikasi data secara langsung di lapangan sebab tidak tersedianya anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2025 yang untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini yaitu sebesar Rp.113.888.000,00 dan sampai dengan akhir TW IV tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 111.234.000,00



Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP

11

Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2025 telah terpenuhi. Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menstandarkan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian tahun 2025 telah tercapai sebesar 100% pada periode Triwulan II dengan NSPK yang dihasilkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Keberhasilan capaian IKU 5 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.
3. Sebagai salah satu dokumen persyaratan pemenuhan ISO 9001:2022

Gambar 17 Pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Manajemen Mutu





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN
OPERASI ARMADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Manajemen Mutu Di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 411).

Gambar 18 Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Kegiatan ini merupakan bagian upaya pemenuhan standar ISO 9001 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan ini secara langsung melekat pada anggaran pemenuhan ISO 9001.



Sasaran Kegiatan 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 8 (delapam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

12

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20 JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20j+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20j+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

ASN Staff:
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20j+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 30. Target dan Realisasi IKU-12 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada	77	81,64	106	78	91,23	117	82	91,39	111,45	81	87,11	107,54	81	81,5	82	82,5	83

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan indeks sebesar 87,11 atau 107,54% dari target indeks 81. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 3,91%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penilaian pada aplikasi.

Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon),

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 12 ini yaitu sebesar Rp.550.857.000,00 dan sampai dengan akhir TW IV tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.549.874.250,00 atau sebesar 99,83%.



13

Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA



Tabel 31. Target dan realisasi IKU 13 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	80,5	87,75	109	84	88,75	103,27	88	89,65	101,88	88	88,2	88,4	88,6	88,8

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 89,65 atau 101,88% dari target 88. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1,39%. Akan tetapi nilai capaian terdapat peningkatan sebesar 2,9 menjadi capaian tertinggi di antara eselon II lingkup PSDKP.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan

Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU 14 Periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW IV Tahun 2025 telah berhasil dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, capaian relatif sama dengan persentase 100%.

Pada Direktorat POA terdapat 25 (dua lima) kegiatan yang menjadi prioritas pengendalian berbasis Manajemen Risiko antara lain:

Tabel 33 Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	5	5	100%
	Direktorat POA	25	25	100%
	Direktorat PSP	8	8	100%
	Direktorat PPSDP	5	5	100%
	Direktorat PPSDK	7	7	100%
	Direktorat PP	11	11	100%

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Risiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 34. Target dan realisasi IKU 15 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	100	75	100	133,33	80	100	125	95	100	105,26	95	86	87	88	89

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi capaian sama yaitu 100% atau semua sudah terselesaikan. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh adanya perintah direktif pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut setiap rekomendasi yang ada dan senantiasa dilakukan pemantauan secara berkala. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dan memastikan tidak terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti atau berstatus proses berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal. Dari 13 temuan, Direktorat POA telah menindak lanjuti semua temuan tersebut.

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	90	90	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	13	13	100.00	0	0
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	12	12	100.00	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	2	2	100.00	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	25	25	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0
16	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0



Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 35. Target dan realisasi IKU 16 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	75	84,98	113,31	80	86,54	108,18	80	80	80	80	80

Capaian Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal telah melaksanakan penilaian terhadap 14 unit kerja yang diusulkan Eselon I untuk memperoleh Predikat WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Direktorat Pengendalian Operasi Armada mendapatkan nilai sebesar 86.54 atau 108.18%. Dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat kenaikan nilai capaian sebesar 1,56 poin. IKU ini tidak ada target pada renstra.

Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) pada Tahun 2025 berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) secara mandiri, berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal KKP yang disupervisi oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk periode penilaian 2024 s.d. Oktober 2025.

Predikat ini merupakan capaian strategis yang signifikan. Selain menjadi bentuk pengakuan atas komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel, capaian tersebut juga memperkuat legitimasi Direktorat POA sebagai unit kerja pelayanan dengan salah satu alokasi anggaran terbesar di lingkup Ditjen PSDKP.



Gambar 19. Piagam Penghargaan Predikat Zona Integritas Menuju WBK Direktorat POA

Berdasarkan hasil penilaian, Direktorat Pengendalian Operasi Armada memperoleh nilai 86,54 atau setara dengan 108,18% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2024, capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,56 poin. Adapun IKU dimaksud tidak tercantum sebagai target dalam Renstra.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Upaya perbaikan untuk setiap area; dan
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi

1 Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- ▶ Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- ▶ Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2 Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3 Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 36. Target dan realisasi IKU 17 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	70	83,29	118,99	80	83,23	104,04	80	81	81	83	84

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2025 sebesar 83.23 atau 104.04% yang dilakukan oleh Tim penilai kearsipan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terdapat penurunan nilai capaian sebesar 0,6, hal ini dikarenakan Direktorat Pengendalian Operasi Armada tidak memenuhi 1 syarat penilaian yaitu tidak memiliki pegawai dengan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- ▶ Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.
- ▶ Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;



Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 37. Target dan realisasi IKU 18 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA				
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028	2029
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada (unit)	1	1	100	1	3	300	1	1	100	77	88,13	114,45	77	78	79	80	80

Berdasarkan tabel diatas, terdapat inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja berupa Salmon Kilat (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor dengan kecepatan Informasi SKAT) yang meraih juara 1 pada lomba inovasi Ditjen PSDKP. Selain itu, inovasi juga tercipta di tingkat perorangan, di mana pegawai Direktorat POA menghasilkan inovasi bernama Fish Guard (Fishermen's Integrated Safety and Harmony, Guidance, Understanding, Awareness, Regulation, and Development), yang memberikan solusi praktis dan efisien dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan tabel diatas, terdapat inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja berupa Salmon Kilat (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor dengan kecepatan Informasi SKAT) yang meraih juara 1 pada lomba inovasi Ditjen PSDKP. Selain itu, inovasi juga tercipta di tingkat perorangan, di mana pegawai Direktorat POA menghasilkan inovasi bernama Fish Guard (Fishermen's Integrated Safety and Harmony, Guidance, Understanding, Awareness, Regulation, and Development), yang memberikan solusi praktis dan efisien dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
- 2 Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
- 3 Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.



Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- ▶ Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- ▶ Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- ▶ Target nilai Satker Pusat minimal 21 yang akan diukur pada triwulan IV 2025

Tabel 38. Rincian target dan realisasi IKU 19 periode TW IV Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA			
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	2025	2026	2027	2028
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	27,18	129	21	28,03	133	70	80,42	111,43	70	86,09	122,98	70	71	72	73

Pada tahun 2025, Direktorat Pengendalian Operasi Armada mendapatkan Nilai Implementasi Program Budaya Kerja sebesar 86,09 atau 122,98% dan terjadi kenaikan signifikan dari realisasi pada tahun 2024. Hal ini adanya penekanan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE Budaya Kerja dengan bobot lebih tinggi terutama pada program Inovasi (HIU) Direktorat POA mendapatkan Juara 1 kategori Inovasi Unit Kerja.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih

- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.

- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.

- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik

- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.

- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.

- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

● **Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)** : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobot PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.

● **Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)** : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.



Ralisasi Anggaran

AKUNTABILITAS KEUANGAN

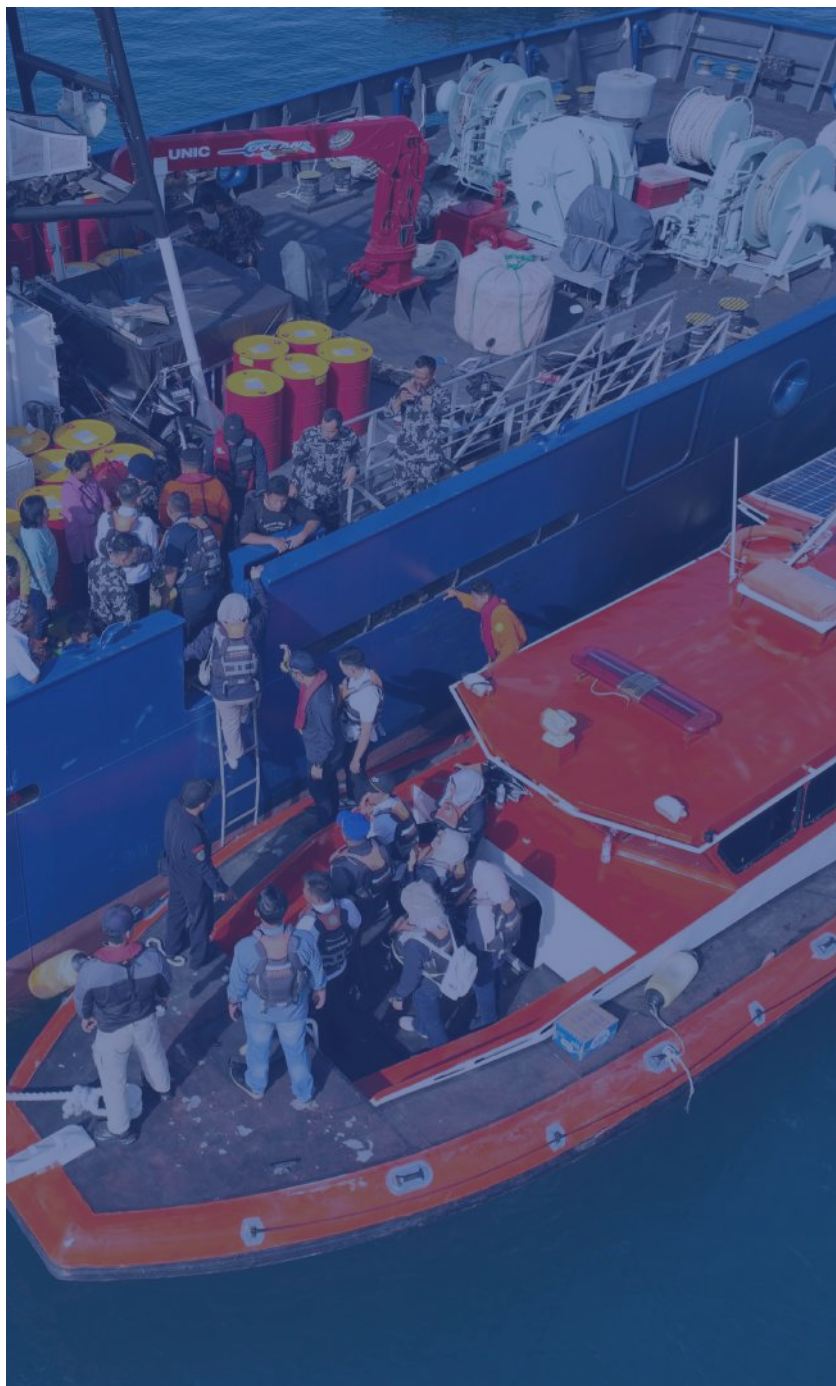
A.

Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW IV tahun 2025 telah melaksanakan 19 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2025. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 245.696.080.000 (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW IV Tahun 2025 sebesar Rp. 240.259.903.800 (dua ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 96,46% dari Pagu anggaran.

Tabel 39. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW IV Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	26,287,969,000	26,228,394,000	99,77%
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	192,843,455,000	187.878.352.800	97,42%
3	QHD. 002 Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	22,935,996,000	22.545.204.000	98,30%
4	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1,280,385,000	1.277.867,000	99,80%
5	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	396,542,000	395.904,000	99,84%
6	2355.EBA. Dukungan Manajerial	1,951,733,000	1,934,182,000	99,10%
TOTAL PAGU		245.696.080,000	240.259.903.800	96,46



B.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2025, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 106,42% (Kriteria: Baik), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 96,46%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (air surveillance) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah intercept. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C.

Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2025 :

Aspek Operasi Armada

Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL). Selain itu, penerapan pola operasi integrated surveillance system (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.

Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Pada tahun 2025, akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian.

Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.

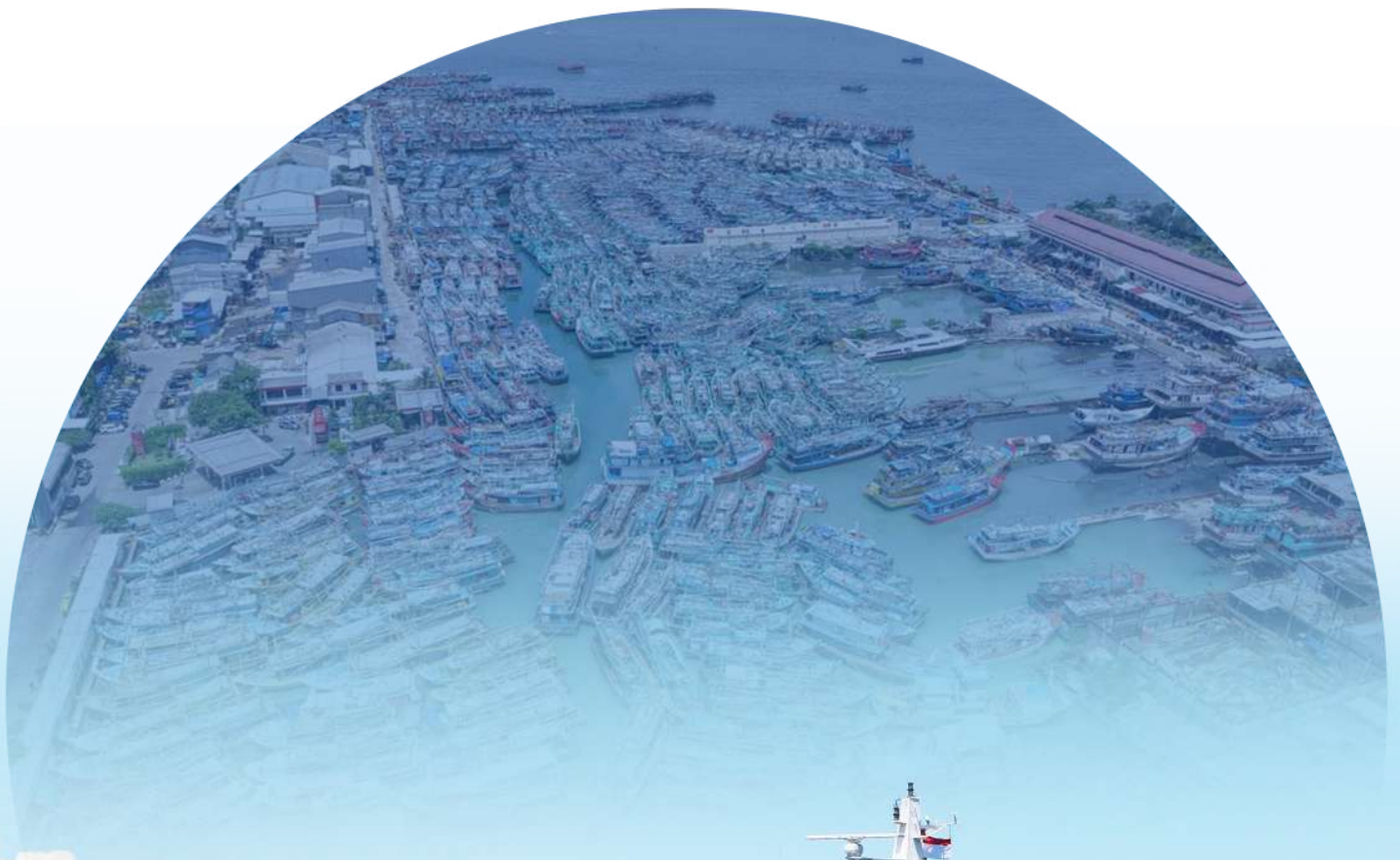
POA Virtual Class

Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

B A B

04

PENUTUP



A. KESIMPULAN

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW IV Tahun 2025 sebesar 106,42% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 240.259.903.800 (96,46%).

2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2025 adalah sejumlah 19 indikator kinerja. Dari target 19 Indikator Kinerja yang diukur, sebanyak 4 IKU tercapai 100% dan 15 IKU tercapai

3. Pada TW IV tahun 2025 terjadi depresiasi nilai kinerja organisasi sebesar 4,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.

4. Terdapat kendala dalam kegiatan supervisi Perawatan Armada Kapal Pengawas di UPT, yakni rendahnya tingkat validasi data karena proses supervisi masih dilakukan secara daring akibat ket-

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan IV tahun 2025, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan IV 2025. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja tahun 2026 yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI

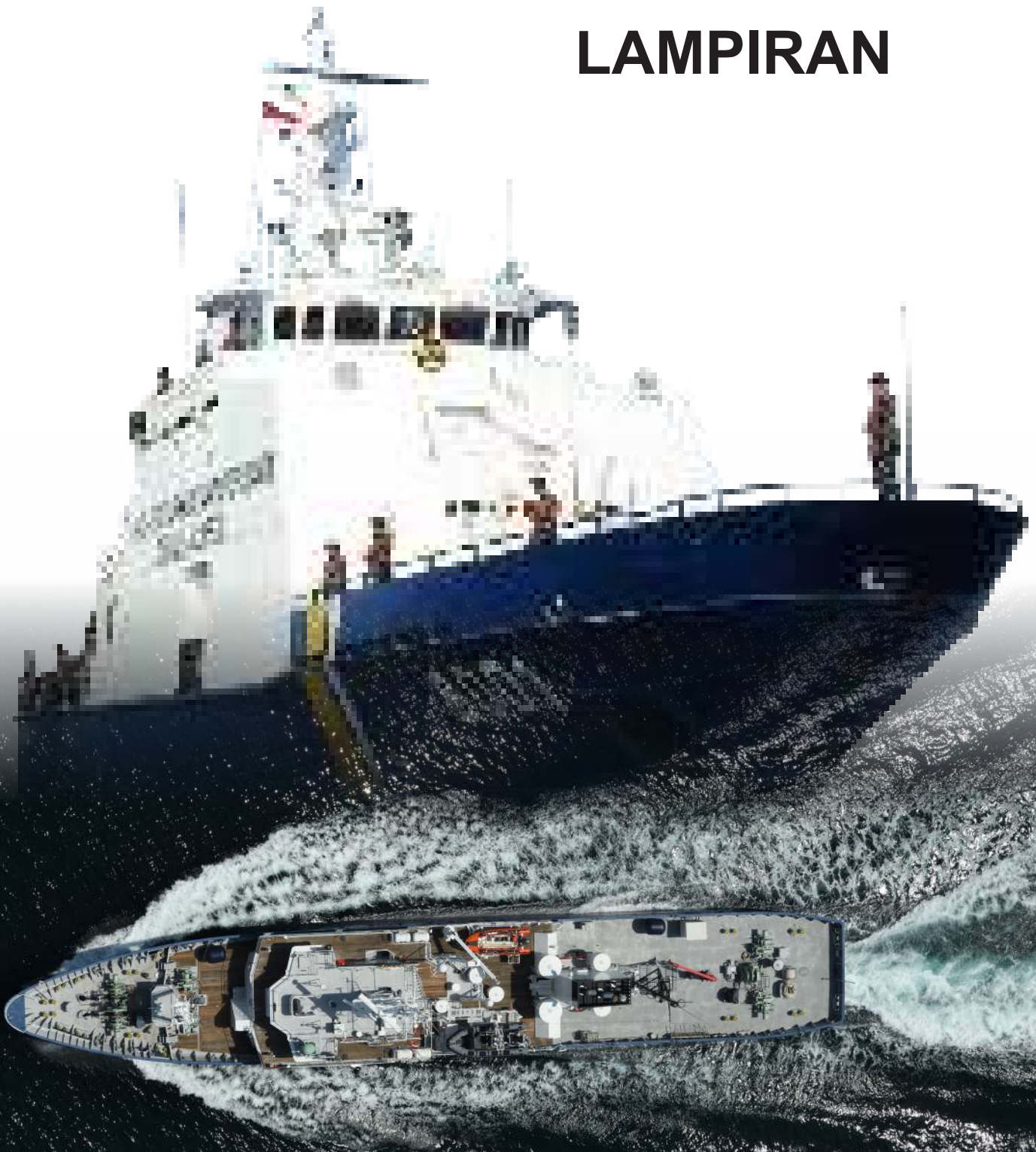
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun

Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja dan Subdit lingkup Direktorat POA

Menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan operasi kapal pengawas maupun pesawat patroli udara

Melaksanakan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja Direktorat POA secara berkala

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saiful Umam**

Jabatan : **Direktur Pengendalian Operasi Armada**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : **Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

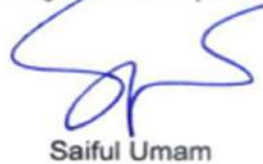
Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		11	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	87
		14	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88
		15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		19	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	254,086,365,000
SK 1.1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		254,086,365,000

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Pung Nugroho Saksono

Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4	Indeks operasi kapal pengawasan (indeks)	92
		5	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		6	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	85
		7	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		8	Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan (%)	75
		9	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		10	Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya (%)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		5	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		6	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	85
		7	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		8	Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan (%)	75
		9	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		10	Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya (%)	82
3	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	11	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (IKU)	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81
		13	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	86
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		16	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA (nilai)	77
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	245.879.080.000
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.3	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	
SK 1.4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		245.879.080.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

Lampiran 3. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat POA Periode Triwulan IV 2025



e-Kinerja [Home](#)

Senin, 26 Januari 2026

NKO Desember - 2025

Download

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Skor Kinerja : 106.75

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, salinlah file nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih tetap ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Terseleenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif								
SK.01	Terseleenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi						112.45		
IKSK.01.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	15-Jan-2026 09:29
IKSK.01.2	Indeks Keparasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Rata-rata	82.00	82.00	98.33	119.91	15-Jan-2026 09:29
IKSK.01.3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82.00	82.00	98.33	119.91	15-Jan-2026 13:35
SK.02	Terseleenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif								
SK.02	Terseleenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						106.79		
IKSK.02.1	Indeks operasi kapal pengawas Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	92.00	92.00	97.52	106.00	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.2	Indeks operasi pesawat patroli Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	95.00	95.00	96.76	101.80	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.3	Indeks Keparasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	85.00	85.00	89.99	105.84	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.4	Indeks Kesiapan Akuat Kapal Pengawas Data Dukung1 Tambah Data Dukung Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	80.00	98.00	120.00	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.5	Persentase Ketidakhadiran Personel Armada Pengawasan Data Dukung1 Tambah Data Dukung Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	75.00	75.00	83.89	111.73	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.6	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	15-Jan-2026 09:29
IKSK.02.7	Persentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi Perawatannya Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	82.00	82.00	90.00	109.76	15-Jan-2026 09:29
SK.03	Terseleenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan								
SK.03	Terseleenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP						100.00		
IKSK.03.1	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	15-Jan-2026 09:29
SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						107.77		
IKSK.04.1	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81.00	81.00	87.11	107.04	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.2	Nilai PM SAVOP Saker lingkup Ditjen PSDKP Tambah Data Dukung Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	86.00	86.00	89.65	104.24	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Rata-rata	95.00	95.00	100.00	105.26	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.5	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	80.00	86.54	108.18	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.6	Nilai Pengawasan Keaslian Internal Unit Kerja lingkup Subditjen PSDKP Tambah Data Dukung Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	80.00	83.23	104.04	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.7	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA Tambah Data Dukung Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	77.00	77.00	86.13	114.45	15-Jan-2026 09:29
IKSK.04.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Tambah Data Dukung Data Dukung1 Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	70.00	70.00	86.09	120.00	15-Jan-2026 09:29
Tutup									

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR: 29/DJPSDKP.3/TU.140/I/2026

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 5 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan periode Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama di bidang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat dan Terintegrasi sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN IV		
			TAHUN 2025	TARGET	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN %
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100%	100%	100%	100%
		2 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP	82	82	98,33	119,92%
		3 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	82	82	95,40	116,3%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febrianto Wardhana Utama

Lampiran 5. Perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau pemanfaatan SDKP Triwulan IV 2025

IKU 1 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

No	WPP	Bulan												Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	WPPNRI 571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
2	WPPNRI 572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
3	WPPNRI 573	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
4	WPPNRI 711	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
5	WPPNRI 712	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
6	WPPNRI 713	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
7	WPPNRI 714	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
8	WPPNRI 715	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
9	WPPNRI 716	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
10	WPPNRI 717	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
11	WPPNRI 718	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
PERSENTASE														100
													Target	100
													Persentase terhadap target	100%

Lampiran 6. Perhitungan capaian IKU pemenuhan data dan analisis periode Triwulan IV 2025

No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Pengolahan Data Kapal Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	40,00
2	Pengolahan Data Kapal Perikanan di Wilayah Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20,00
3	Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20,00
4	Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airbone Surveillance	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	18,33
Indeks															98,33
													Target		82,00
													Persentase terhadap target		119,92%

Lampiran 7. Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli dan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas periode Triwulan IV 2025

Target dan Realisasi Capaian Kinerja lingkup
Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas Dan Pesawat Patroli
Periode Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW IV	Capaian TW IV	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	95	95	96,76	101,85
2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	92	92	97,52	106

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
Nomor 116/DJPSDKP.3/TU.140/I/2026

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Periode TW IV Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.


Herry Mulyono

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Lampiran 7. Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli dan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas periode Triwulan IV 2025

No.	Karakteristik Responden	Indikator	Jumlah	Persentase
Jumlah AKN			207	
Jumlah Responden			172	83%
1.	Jabatan	Nakhoda	10	5%
		Mualim	22	11%
		Markonis	8	4%
		KKM	10	5%
		Masinis	21	10%
		Serang	10	5%
		Juru Mudi	25	12%
		Juru Minyak	23	11%
		Kelasi	27	13%
		Juru Masak	16	8%
		Pengawas Perikanan Pertama	0	0%
		Pengawas Perikanan Terampil	0	0%
		Pengawas Perikanan Pemula	0	0%
2.	Jenis Pengguna (Unit)	KP. Orca 01	18	8,21%
		KP. Orca 02	22	10,63%
		KP. Orca 03	23	11,11%
		KP. Orca 04	22	10,63%
		KP. Orca 05	22	10,63%
		KP. Orca 06	15	7,25%
		KP. Barakuda 01	17	9,88%
		KP. Barakuda 02	15	7,25%
		KP. Paus 01	12	5,80%
		KP. Akar Bahar 01	6	2,90%
3.	Jenis Layanan	Penyediaan Logistik Armada Pengawasan AKN	172	83%

No.	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang per Unsur
1	Ketersediaan dan Kelengkapan Logistik	4,47	0,26
2	Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman	4,41	0,26
3	Kualitas Pelayanan dan Komunikasi	4,57	0,26
4	Prosedur dan Administrasi	4,54	0,27
5	Kompetensi Tim Logistik	4,45	0,26
6	Penanganan Masalah/Keluhan	4,44	0,26
7	Kepuasan Secara Keseluruhan	4,67	0,27
NRR tertimbang / NRR per unsur		4,51	
Nilai Survey Kepuasan Pelayanan		89,96	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.145/DJPSDKP.1/OT.710/I/2026 14 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

di Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada triwulan IV tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	5	5	100%
	Direktorat POA	25	25	100%
	Direktorat PSP	8	8	100%
	Direktorat PPSDP	5	5	100%
	Direktorat PPSDK	7	7	100%
	Direktorat PP	11	11	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	9	9	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	13	13	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	14	14	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	16	16	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	10	10	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	17	17	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	8	8	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	12	12	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	18	18	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	5	5	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	7	7	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	9	9	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	9	9	100%
Total		219	219	100%

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026

Yth : 1. Direktur lingkup Ditjen PSDKP
2. Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP
Dari : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III Lingkup Ditjen PSDKP" periode Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 9 Januari 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan data capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III lingkup Ditjen PSDKP Periode Triwulan IV Tahun 2025" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II dan III sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% (tuntas 250 dari 250 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon II dan III periode Triwulan IV Tahun 2025 disampaikan pada lampiran.
4. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama, komitmen, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP sehingga Ditjen PSDKP dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	90	90	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	13	13	100.00	0	0
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	12	12	100.00	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	2	2	100.00	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	25	25	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0
16	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0